

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrani, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M, 2018, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, Prenada Media.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Manajemen Perbankan*, Alfabeta, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram.

Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan “eksistensi kejaksaan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara”*, Laksbang Justitia.

Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar *Operating* Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

C. Jurnal

Budi Rizki, H, “*Studi lembaga penegak hukum*”. Studi Lembaga Penegak Hukum, 2020.

Chosyali, A., & Sartono, T, “*Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah*”. Law Reform, 15(1), 98-112, 2019, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>.

Fernos, J., & Sinda, T. L, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang*” (No. q4b6k). Center for Open Science, 2020, <https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.31219%252Fosf.io%252Fq4b6k;h=repec:osf:osfxxx:q4b6k>.

Firmanto, F, “*Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*”, Jurnal Pahlawan, 2(2), 29-35, 2019, <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.577>.

Isnantiana, N. I, “*Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 19-35, 2019, <https://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

Mulyanto, M, “*Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta*”. Dinamika Hukum, 9(3), 2018.

Telaumbanua, A. C, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan*”. BALANCE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 5(2), 30-41, 2022.

D. Skripsi, Tesis, Disertasi

Agustin, E., & Mumpuni, N. W. R. (2024). *Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)*. Syntax Idea, 6(8), 3352-3369.

Prianka, J. A. (2024). *Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Sukoharjo*.

Salipi, H. (2016). *Peranan Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Penyelesaian Hukum Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Bank Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

E. Internet

Hukum Online, “Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi->

[jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/](#) diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

Hukum *Online*, “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan”,
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/](#) , diakses pada tanggal 20 November 2024.

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, “Pengertian Kejaksaan”, [https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan](#) , diakses pada tanggal 19 November 2024.

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, “Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi)”,
[https://umohbasilo.com/page/radar-datun-bantuan-hukum-litigasi-non-litigasi](#), diakses pada tanggal 17 November 2024.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Mengenal Kolektibilitas Kredit Perbankan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”,
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-KaitannyaDengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html](#), diakses pada tanggal 18 November 2024.